

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2026.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi

nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Bima. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2027. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2027 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kabupaten Bima Tahun 2027.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Ekonomi global tahun 2025 tumbuh 3,4 persen dan diperkirakan melambat menjadi 3,1 persen pada 2026 (Internasional Mandatory Fund (IMF), April 2026). Perlambatan tersebut dipengaruhi utamanya ketidakpastian kebijakan tarif dan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketidakpastian tarif dan investagasi section 301 terhadap negara mitra oleh Amerika Serikat, termasuk indonesia, berpotensi menekan kinerja perdagangan dan rantai pasok global. Eskalasi konflik geopolitik tersebut memperbesar resiko kenaikan harga energi dan komoditas.

Pada tahun 2027, ekonomi global diproyeksikan tumbuh 3,2 persen, ditopang terutama oleh Tiongkok dan India, masing-masing 4,0 persen dan 6,5 persen (IMF, April 2026). Pertumbuhan tersebut didukung oleh investasi teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), namun tetap dibayangi ketidakpastian perdagangan dan geopolitik.

Stabilitas makro ekonomi indonesia tahun 2025 tetap terjaga, ditopang pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, inflasi terkendali, cadangan devisa kuat, dan surplus neraca perdagangan. Pertumbuhan ekonomi terutama didukung konsumsi rumah tangga, ekspor, investasi, serta sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian.

Pada triwulan I-2026, perekonomian indonesia tumbuh 5,6 persen (y-on-y) didorong oleh akselerasi konsumsi masyarakat pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN); implementasi program prioritas pembangunan; serta peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Kinerja ini menjadi sinyal positif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen dan menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2027.

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari sisi lapangan usaha akan didorong utamanya oleh sektor industri pengolahan yang didukung oleh hilirisasi sektor-sektor prioritas serta program disektor pertanian.

Secara kewilayahan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan terjaga melalui keseimbangan antara akselerasi hilirisasi di timur dan penguatan sektor manufaktur serta jasa di wilayah barat. Pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI) diproyeksikan mencapai enam persen, dipicu oleh masifnya aktivitas hilirisasi nikel di Wilayah Maluku dan Sulawesi, pemulihan pariwisata di Bali-Nusa Tenggara serta sektor peningkatan sektor pertambangan dan berlanjutnya konstruksi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Sementara itu, Kawasan Barat Indonesia (KBI) diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3 persen yang ditopang oleh kinerja wilayah Jawa melalui sektor industri dan jasa, serta wilayah Sumatera yang didorong oleh peningkatan permintaan komoditas unggulan dan pembangunan infrastruktur.

Sektor eksternal tetap terjaga pada tahun 2025, tercermin dari defisit transaksi berjalan yang rendah sebesar US\$ 1,45 miliar atau 0,1 persen PDB serta cadangan devisa US\$ 156,47 miliar atau setara 6,2 bulan impor. Pada tahun 2026, neraca perdagangan barang diperkirakan surplus US\$ 47,23 miliar, utamanya didukung produk hilirisasi bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global, pemanfaatan *free trade agreement* (FTA), kerja sama internasional, dan reformasi kebijakan perdagangan dan iklim usaha. Neraca keseluruhan diperkirakan surplus US\$ 1,75 miliar dengan cadangan devisa US\$ 158,22 miliar pada tahun 2026.

Di sisi keuangan negara, kinerja APBN 2025 tetap solid, dengan pendapatan negara Rp 2.756,2 triliun (11,61 persen dari PDB) dan belanja negara Rp 3.434,7 triliun (14,42 persen dari PDB). APBN tetap berperan menjaga stabilitas, daya beli, kesinambungan fiskal, dan pelaksanaan prioritas pembangunan. Defisit terjaga di bawah batas tiga persen yaitu sebesar 2,81 persen PDB, serta rasio utang berada jauh di bawah batas 60 persen PDB.

Di tahun 2026, APBN diarahkan untuk mendukung pertumbuhan tinggi dan pemerataan, dengan pendapatan negara diperkirakan 12,26 persen PDB, belanja

negara 14,94 persen PDB, defisit 2,68 persen PDB, dan keseimbangan primer negatif 0,35 persen PDB.

Kebijakan moneter 2025 relatif lebih ekspansif, ditandai penurunan BI-Rate sebesar 125 bps menjadi 4,75 persen. Pada tahun 2026, inflasi diperkirakan tetap terkendali, namun penurunan suku bunga akan lebih terbatas dipengaruhi ketidakpastian global. Ketahanan sektor keuangan tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tecermin dari peningkatan likuiditas, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) dan terjaganya fungsi intermediasi.

Fungsi intermediasi tetap terjaga, tecermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang berada pada level 85,35 persen pada tahun 2025. Kinerja intermediasi tersebut turut ditopang oleh pertumbuhan kredit sebesar 9,63 persen dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 13,83 persen sepanjang tahun 2025. Selain itu, terjaganya fungsi intermediasi juga didukung oleh kondisi perbankan yang tetap solid, sebagaimana tecermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang kuat di level 25,87 persen serta penurunan rasio Non-Performing Loan (NPL) menjadi 2,05 persen pada periode yang sama.

Namun demikian, ruang penyaluran kredit masih besar, tecermin dari tingginya undisbursed loan yang mencapai Rp 2.439,2 triliun atau 22,12 persen dari total plafon kredit yang tersedia pada Desember 2025, dan meningkat menjadi 22,86 persen pada Februari 2026. Untuk itu, perbaikan iklim investasi dan akses pembiayaan sektor prioritas perlu diperkuat. Di sisi lain, industri keuangan nonbank menunjukkan kinerja positif pada tahun 2025, dengan aset asuransi dan dana pensiun terhadap PDB tetap terjaga serta tumbuh positif pada awal 2026, memperkuat peran pembiayaan jangka panjang.

Pendalaman pasar modal menunjukkan penguatan signifikan pada akhir 2025, tecermin dari IHSG yang mencapai level 8.646,93 serta kapitalisasi pasar 66,53 persen PDB. Namun demikian, memasuki tahun 2026 pasar saham mengalami koreksi, tecermin pada Maret 2026 IHSG di level 7.048,22 dengan pertumbuhan sebesar 8,26 persen (YoY), dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp 12.422 triliun atau tumbuh 11,65 persen (YoY). Perkembangan ini dipengaruhi oleh pernyataan MSCI yang menangguhkan sementara perubahan indeks untuk saham-saham Indonesia serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Sejalan dengan hal tersebut, hingga 16

April 2026, *yield* SBN tenor 10 tahun tercatat berada di level 6,59 persen, menunjukkan risiko investor mulai termoderasi.

Di sisi keuangan syariah, total aset keuangan syariah mencapai Rp 12.388,52 triliun pada Desember 2025, utamanya didorong pasar modal syariah. Perbankan syariah dan industri keuangan nonbank (IKNB) syariah tetap tumbuh, tetapi masih perlu akselerasi.

Akses kepada lembaga keuangan yang tecermin dari inklusi keuangan meningkat dari 75,02 persen pada 2024 menjadi 80,51 persen pada 2025, didukung oleh subsektor pembiayaan tetap positif. Piutang perusahaan pembiayaan tumbuh menjadi Rp 512,14 triliun dengan *Non-Performing Financing/NPF* tetap rendah sebesar 2,78 persen. Pada tahun 2026, inklusi keuangan meningkat menjadi 91,50 persen.

Tahun 2027 sebagai tahun ketiga RPJMN Tahun 2025–2029 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi menuju target delapan persen pada 2029, dengan sasaran 2027 sebesar 5,9-7,5 persen. Pertumbuhan ini diharapkan meningkatkan *gross national income* (GNI) per kapita ke US\$ 5.900–5.990, mempertahankan status negara berpendapatan menengah atas, serta mendukung agenda transisi hijau melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM melalui penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan serta peningkatan Indeks Modal Manusia. Selain itu, kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal menjadi indikator utama untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk responsif, terarah dan terukur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri. Fokus kebijakan mencakup penguatan pendapatan negara, optimalisasi belanja negara yang efisien dan berdampak tinggi, serta pengelolaan keseimbangan primer, defisit, dan utang secara *prudent* untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi.

Pengendalian inflasi difokuskan pada empat agenda. Pertama, stabilisasi pasokan dan harga melalui bantuan pangan, gerakan pangan murah, dan evaluasi

harga eceran tertinggi komoditas pangan. Kedua, peningkatan produksi dalam negeri melalui pengembangan kawasan pangan dan hortikultura, bantuan sarana dan infrastruktur produksi, pengolahan dan penyimpanan produk pangan, serta penguatan cadangan pangan pusat dan daerah. Ketiga, kelancaran distribusi melalui peningkatan konektivitas antarwilayah dan perluasan kerja sama antardaerah. Keempat, perbaikan kualitas dan integrasi data pangan, penguatan perencanaan, serta koordinasi kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah secara tepat untuk menekan inflasi, menjaga daya beli, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Stabilitas nilai tukar rupiah dijaga agar tetap sesuai dengan fundamental melalui langkah utama: intervensi stabilisasi di pasar luar negeri dan domestik melalui transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF), *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder; strategi operasi moneter *pro-market* untuk memperkuat transmisi kebijakan, menarik aliran modal asing dengan mengoptimalkan instrumen SRBI, dan memperdalam pasar uang serta pasar valas; penetapan BI-Rate yang adaptif terhadap dinamika global dan domestik; pemeliharaan cadangan devisa untuk stabilisasi rupiah dan pembayaran utang luar negeri pemerintah; penguatan kebijakan transaksi valas melalui penyesuaian *threshold* transaksi jual-beli valas dan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD), serta penguatan komunikasi kebijakan untuk membangun ekspektasi positif dan kepercayaan pasar.

Kebijakan moneter juga disinergikan dengan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Sinergi tersebut dilakukan melalui pelonggaran makroprudensial yang tetap menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan, insentif likuiditas berbasis kinerja untuk mendorong kredit sektor riil, penguatan transmisi penurunan BI-Rate ke suku bunga pembiayaan, serta peningkatan *surveillance* sistemik untuk mendukung pembiayaan ekonomi hijau. Kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada efisiensi dan penurunan biaya transaksi, perluasan pembayaran digital yang interoperabel, kerja sama lintas negara, modernisasi infrastruktur dan manajemen risiko, serta pengembangan bertahap Rupiah Digital atau *central bank digital currency* (CBDC).

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nusa Tenggara Barat

Kondisi perekonomian NTB dapat dilihat dari indikator-indikator makro seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Indeks Modal Manusia (IMM). Pada tahun 2024 perekonomian NTB tumbuh sebesar 5,30% melampaui target yang ditetapkan yakni 5%, sementara itu pada triwulan III tahun 2025 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 2,82% dimana pada triwulan I dan II mengalami kontraksi salah satunya diakibatkan dari penurunan ekspor pertambangan.

Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup positif, hal ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kinerja sektor-sektor produktif yang mengalami lonjakan signifikan, khususnya Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 40,71 persen.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi NTB menunjukkan bahwa perekonomian daerah tetap berada pada jalur ekspansi meskipun dengan laju yang relatif moderat. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan kembali menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 66,65 persen. Kinerja tersebut mengindikasikan semakin kuatnya peran sektor industri dalam struktur ekonomi daerah, yang diduga dipengaruhi oleh proses hilirisasi, peningkatan kapasitas produksi, serta membaiknya kinerja ekspor komoditas unggulan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,89 persen, mencerminkan masih signifikannya peran belanja pemerintah dalam menjaga stabilitas dan menggerakkan aktivitas ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta berbagai program sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, pola pertumbuhan ekonomi NTB pada Triwulan III Tahun 2025 memperlihatkan adanya dorongan kuat dari sektor industri dan aktivitas ekspor dalam jangka pendek, serta dukungan belanja pemerintah dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan secara tahunan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan sektor industri pengolahan sebagai motor utama perekonomian daerah ke depan, yang perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur, konektivitas

logistik, ketersediaan energi, serta pengembangan sumber daya manusia. Di sisi lain, untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan, diperlukan pula upaya diversifikasi basis ekonomi dan penguatan sektor-sektor lain, termasuk UMKM dan pasar domestik, agar perekonomian NTB menjadi semakin tangguh dan inklusif.

Berdasarkan perbandingan indikator makro pembangunan, target RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 secara umum telah selaras dengan target nasional dan target RPJMD. Pada indikator pertumbuhan ekonomi, NTB menargetkan pertumbuhan sebesar 4,8-5,7 persen, sejalan dengan target nasional untuk NTB sebesar 4,4-5,7 persen. Tingkat inflasi ditargetkan berada pada kisaran 2,20-3,52 persen, mendekati sasaran nasional sebesar 2,5 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka, NTB menargetkan penurunan hingga 2,00-2,69 persen dari realisasi 2025 sebesar 3,06 persen, menunjukkan komitmen kuat dalam penciptaan lapangan kerja. Demikian pula, target rasio gini sebesar 0,351-0,353 telah sesuai dengan target nasional untuk NTB, yang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pada indikator kemiskinan, NTB masih menghadapi tantangan cukup besar. Realisasi tingkat kemiskinan tahun 2025 sebesar 11,78 persen masih berada di atas target nasional untuk NTB pada tahun 2027 sebesar 9,64-10,64 persen. Meski demikian, target RKPD 2027 telah ditetapkan pada kisaran 9,9-10,80 persen, yang menunjukkan arah kebijakan yang konsisten untuk mempercepat penurunan kemiskinan melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Sementara itu, pada indikator Indeks Modal Manusia (IMM/IPM), target RKPD 2027 sebesar 0,58 berada di atas target nasional untuk NTB sebesar 0,563-0,570, mencerminkan komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2027 mengarahkan kebijakan ekonomi pada upaya menjaga stabilitas dan memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah dan panjang. Pengendalian inflasi dan stabilisasi harga dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan cadangan pangan pemerintah, perbaikan efisiensi distribusi antarwilayah, modernisasi pasar rakyat, serta penguatan koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Sejalan dengan itu, perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran didorong melalui program padat karya produktif, penguatan pendidikan dan pelatihan

vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, serta pengembangan program magang dan kemitraan dengan sektor swasta. Penguatan UMKM juga menjadi prioritas melalui pendampingan usaha, perluasan akses pembiayaan, serta digitalisasi rantai pemasaran guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing pelaku usaha lokal, sekaligus memperluas basis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, percepatan pengurangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan antarwilayah ditempuh melalui integrasi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin serta peningkatan akses terhadap layanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi di wilayah kurang berkembang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan melalui perbaikan mutu pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan literasi dan keterampilan berbasis ekonomi digital. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan, pemerintah daerah juga menekankan peningkatan kualitas belanja, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi berbagai sumber pendanaan melalui APBD, dukungan pemerintah pusat, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan pembiayaan inovatif lainnya, sehingga sejalan dengan arah RPJMD dan prioritas pembangunan nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bima

Secara umum indikator dalam mengukur perekonomian daerah adalah Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, indeks pembangunan manusia, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Dalam upaya mensinkronkan semua aspek pembangunan maka Pemerintah Kabupaten Bima telah menjalankan fungsinya dengan memprioritaskan berbagai aspek yang menjadi isu utama dan target program yang menjadi landasan dalam penetapan RKPD Pemerintah Daerah di tahun 2026.

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian regional serta kebijakan pemerintah maka beberapa proyeksi makro ekonomi Kabupaten Bima tahun 2026 diperkirakan akan bergerak moderat atau cenderung stabil dengan adanya dukungan dari program strategis Nasional Berupa Koperasi Desa Merah Putih dan

Ketahanan Pangan yang dapat menumbuhkan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan dimana sektor ini menjadi tulang punggung terhadap kontribusi PDRB, Kabupaten Bima belum mampu untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67% yang ditargetkan pada Tahun 2026.

Disamping itu, upaya dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Penguatan Kelompok Tani dan Kelompok Nelayan. Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam RKPD Tahun 2026 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja.

Tabel 3. 1 Realisasi dan Target Makro Ekonomi Kabupaten Bima 2023 – 2026

Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026 (Awal)	Target 2026 (Perubahan)
Laju pertumbuhan ekonomi	(%)	3,93	2,82	3,22	5,67	5,67
Tingkat kemiskinan	(%)	14,39	13,88	12,59	11,39	11,39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,33	70,99	71,97	73,38	73,38
Laju inflasi	(%)	2,30	2,33	2,94	2,68	2,68
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	(%)	2,15	2,15	2,13	2,02	2,02
Gini Rasio	Nilai	0,356	0,358	0,356	0,337	0,307
Penurunan Emisi GRK	(%)	-	-		23,33	
PDRB per Kapita	Rp.juta	26,04	27,15	28,10	42,64	29,05
Kontribusi PDRB Kabupaten Bima terhadap Provinsi	(%)	n/a	8,10	8,12	9,72	9,72
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	66,48	63,1	69,72	74,89	74,89

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima mengalami peningkatan pada Tahun 2025 sebesar 3,22% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 2,82% namun peningkatan ekonomi tersebut belum mencapai target direncanakan pada Tahun 2025 yaitu sebesar 5,63%. Kabupaten Bima pada tahun 2026 akan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67%. Tantangan bagi Kabupaten Bima dalam

memenuhi Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67% ini diantaranya dipengaruhi oleh berkurangnya transfer ke daerah, Kondisi ini memaksa Kabupaten Bima untuk bekerja ekstra keras mencari sumber pendanaan lainnya diluar APBD dan sumber pendapatan mandiri melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Peningkatan PAD dengan menaikkan pajak atau retribusi di tengah upaya mengejar pertumbuhan ekonomi memiliki tantangan yang dilematis, karena bisa membebani pelaku usaha. Dengan memperhatikan hal diatas maka perlu strategi kreatif non-fiskal yang berfokus pada kolaborasi, efisiensi, dan optimalisasi potensi lokal tanpa harus mencekik dunia usaha.

Penguatan ekonomi daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta melalui Digitalisasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, penguatan BUMD, penguatan UMKM, penguatan sentra-sentra pertanian, peternakan dan perikanan serta sektor lainnya perlu terus didorong sebagai solusi untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi disamping upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif perizinan yang cepat dan transparan merupakan salah satu solusi mempercepat proses pembangunan terutama didalam bidang ekonomi walaupun dalam kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. Dalam upaya memenuhi gap antara realiasi dan Target atau dalam merealisasikan target indikator makro daerah Pemerintah Kabupaten Bima berupaya bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kebijakan :

- a) Hilirisasi pada sektor-sektor yang mendorong nilai tambah ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal khususnya sektor pertanian (bawang merah dan jagung);
- b) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Retribusi dan Pajak Daerah;
- c) Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kelompok Tani dan Nelayan;
- d) Peningkatan Nilai Tambah PDRB sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Jasa;
- e) Percepatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f) Percepatan penurunan Kemiskinan ekstrim dan Perlindungan Sosial;
- g) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

- h) Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) melalui penurunan angka kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting;
- i) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar dan Konektivitas Wilayah;
- j) Peningkatan Pengelolaan Persampahan melalui penanganan dan pengurangan Persampahan;
- k) Pembangunan Rendah Karbon dan Respon terhadap Perubahan Iklim;
- l) Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan daerah sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selaras dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi;
- m) Pemberian fasilitas kepada dunia usaha sesuai dengan kemampuan daerah diantaranya kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, rendahnya angka unjuk rasa, etos kerja masyarakat lokal yang tinggi, dan penyediaan infrastruktur pendukung;
- n) Peningkatan Pelayanan Melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). PTSP perlu mengacu kepada standar pelayanan prima sehingga memuaskan Masyarakat;
- o) Peningkatan kerjasama dengan daerah lain. Kerjasama antar daerah diperlukan untuk mengurangi ketidakharmonisan dan inkonsistensi kebijakan yang bersifat lintas wilayah.

3.1.4 Tantangan Dan Strategi

Berkaca pada kondisi perekonomian di tahun 2025 dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima tahun 2026, maka perekonomian Kabupaten Bima masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari dinamika ekonomi global dan regional.

1. Tantangan

Beberapa tantangan yang akan dihadapi

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,22% atau mengalami peningkatan 0,40% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 2,82%. Terdapat Peningkatan Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bima namun Belum mencapai target sebesar 5,63% sesuai target RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025.

- b. Angka pengangguran terbuka Kabupaten Bima Tahun 2025 adalah sebesar 2,13% mengalami penurunan sebesar 0,02% dari tahun 2024 sebesar 2,15%, namun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu ada skenario atau inovasi dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif;
- c. Persentase penduduk miskin tahun 2025 sebesar 12,59% yang masih relatif lebih. Angka ini menurun 1,29% dibanding dengan tahun 2024 sebesar 13,88%. Dengan adanya percepatan transformasi ekonomi, diperkirakan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bima juga akan berkurang namun belum mencapai target sebesar 12,18% sesuai target RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025.
- d. Peningkatan belanja daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah untuk percepatan transformasi ekonomi di seluruh sektor urusan pemerintah daerah, menuntut untuk peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sumber.
- e. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah di kawasan strategis dan infrastruktur dasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. Belum Optimalnya penyerapan anggaran;
- g. Fluktuasi ekonomi global, baik internasional, Nasional terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang akan berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Bima

2. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi tantangan yang muncul pada triwulan I tahun 2026, melalui Perubahan RKPD tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Mencari peluang sumber pendanaan lain diluar APBD Kabupaten Bima dalam mendorong program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Pencermatan terhadap belanja daerah, disesuaikan dengan penyesuaian arah kebijakan pembangunan tahun 2026 dalam Upaya Pemenuhan SPM, mengentaskan kemiskinan, Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik serta belanja mandatory maupun Tematik lainnya.;
- c. Reviu terhadap belanja yang tidak produktif dan fokus pada belanja yang memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik;
- d. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang

terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;

- e. Meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Bima;
- f. Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong setiap Perangkat Daerah untuk konsisten menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran;

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Pada perubahan RKPD tahun 2026, kebijakan keuangan juga memprioritaskan penyelesaian opini BPK Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta memperhatikan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kabupaten Bima menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia

usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Bima sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bima dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

3.2.1 Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan

Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu triwulan satu tahun 2026 serta adanya hasil evaluasi terhadap capaian RKPD Triwulan I Tahun 2026 menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perkembangan pada kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan APBD Tahun 2026 dengan memperhatikan adanya penambahan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kurang Bayar Lebih Bayar serta penyesuaian atas turunnya Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat, sehingga adanya perubahan proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026;
- b. Penginputan Belanja yang bersumber dari dana SiLPA mengingat Keadaan Prognosis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp **68.415.882.472,70** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dapat digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Adanya penambahan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah senilai Rp. 2.000.000.000,- atas hadiah perlombaan Kategori Pengendalian Inflasi, Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting oleh Kementerian Dalam Negeri.
- d. Adanya laporan belanja tematik pada RKPD Kabupaten Bima Tahun 2026 untuk belanja Tematik Kemiskinan dan Stunting yang tidak terhitung dan terhitung tapi tidak dapat diklaim.
- e. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar OPD; penambahan alokasi anggaran kegiatan; penambahan, pengurangan dan/atau penyesuaian target dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

3.2.2 Kerangka Pendanaan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2026 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 dan memperhatikan arah kebijakan kepala daerah terpilih. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2026 sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 2 Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2026

Nomor	Uraian	APBD Murni 2026	Perubahan RKPD TA. 2026	Tambah (kurang)
1	2	3	4	5 (4-3)
4	PENDAPATAN DAERAH			
04.01	Pendapatan Asli Daerah	221.667.211.907,00	219.877.211.907,00	-1.790.000.000,00
04.01.01	Pajak Daerah	42.554.335.000,00	42.554.335.000,00	0,00
04.01.02	Retribusi Daerah	155.638.135.907,00	155.648.135.907,00	10.000.000,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.844.055.000,00	7.844.055.000,00	0,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	15.630.686.000,00	13.830.686.000,00	-1.800.000.000,00
04.02	Pendapatan Transfer	1.632.898.599.821,00	1.912.835.841.821,00	279.937.242.000,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.572.408.830.000,00	1.852.346.072.000,00	279.937.242.000,00
04.02.02	Transfer Antar Daerah	60.489.769.821,00	60.489.769.821,00	0,00
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32.036.009.000,00	8.942.699.300,00	-23.093.309.700,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	32.036.009.000,00	8.942.699.300,00	-23.093.309.700,00
		1.886.601.820.728,00	2.141.655.753.028,00	255.053.932.300,00

Nomor	Uraian	APBD Murni 2026	Perubahan RKPD TA. 2026	Tambah (kurang)
5	BELANJA DAERAH			
05.01	Belanja Operasi	1.646.065.152.267,00	1.794.185.675.908,00	148.120.523.641,00
05.01.01	Belanja Pegawai	1.188.499.969.357,00	1.210.590.580.543,00	22.090.611.186,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	443.802.563.910,00	568.322.476.365,00	124.519.912.455,00
05.01.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
05.01.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
05.01.05	Belanja Hibah	13.727.629.000,00	15.237.629.000,00	1.510.000.000,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	34.990.000,00	34.990.000,00	0,00
05.02	Belanja Modal	71.201.909.180,00	115.671.665.393,00	44.469.756.213,00
05.02.01	Belanja Tanah	339.830.000,00	339.830.000,00	0,00
05.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	16.814.396.590,00	41.142.879.680,00	24.328.483.090,00
05.02.03	Belanja Bangunan Gedung	18.087.482.840,00	30.379.525.963,00	12.292.043.123,00
05.02.04	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	35.914.859.750,00	43.799.429.750,00	7.884.570.000,00
05.02.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	45.340.000,00	10.000.000,00	-35.340.000,00
05.03	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	5.500.000.000,00	2.000.000.000,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	5.500.000.000,00	2.000.000.000,00
05.04	Belanja Transfer	265.920.570.000,00	293.714.294.200,00	27.793.724.200,00
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	5.860.855.000,00	5.860.855.000,00	0,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	260.059.715.000,00	287.853.439.200,00	27.793.724.200,00
		1.986.687.631.447,00	2.209.071.635.501,00	222.384.004.054,00
	Surplus/ Defisit	-100.085.810.719,00	-67.415.882.473,00	32.669.928.246,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
06.01	Penerimaan Pembiayaan			
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	101.085.810.719,00	68.415.882.473,00	-32.669.928.246,00
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00

Nomor	Uraian	APBD Murni 2026	Perubahan RKPD TA. 2026	Tambah (kurang)
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
06.01.06	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		101.085.810.719,00	68.415.882.473,00	-32.669.928.246,00
06.02	Pengeluaran Pembiayaan			
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0,00	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
06.02.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0,00	0,00
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0,00	0,00
06.02.05	Dana Bergulir	0	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Neto	100.085.810.719,00	67.415.882.473,00	-32.669.928.246,00
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA-TB)	0,00	0,00	0,00

3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Bima selama 2021-2025 menunjukkan peningkatan setiap tahun. Di tahun 2021 realisasi pendapatan adalah 1,77 triliun dan di tahun 2025 naik menjadi 1,87 triliun walaupun adanya penurunan pendapatan dari tahun 2024 dengan realisasi pendapatan 2,09 triliun. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan atau kenaikan pendapatan per tahun selama 2021-2025 mencapai 1,32%. Komponen pendapatan terdiri dari tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer. Di Tahun 2021 pendapatan transfer mencapai 1,55 triliun atau 87,40% dari pendapatan dan pada tahun 2025 pendapatan transfer

mencapai 1,60 triliun atau 85,89%. Selama 2021-2024 pendapatan transfer bukan saja menunjukkan kenaikan secara nominal namun juga secara proporsi walaupun dengan adanya penurunan pendapatan transfer sebesar 8,33% pada Tahun 2025 seiring dengan berkurangnya total realisasi pendapatan daerah. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer yaitu 0,88% per tahun. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, selama 2021-2025 terlihat menunjukkan tren Fluktuatif dalam periode ini, dengan nilai 81,90 milyar di tahun 2021 menjadi 82,12 milyar di tahun 2025 atau memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,07%.

Dalam struktur PAD komponen Retribusi memiliki kontribusi terbesar pada Tahun 2025 akibat adanya Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Lain-lain PAD yang Sah yaitu sebesar 78,45%. Tahun 2021 Retribusi memiliki kontribusi 12,80% dari PAD dan di tahun 2025 naik menjadi 47,64% dengan demikian rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 47,82%.

Disamping itu adanya kenaikan pada Penerimaan pajak dalam struktur PAD pada Tahun 2021 penerimaan pajak hanya 13,77 milyar dan tahun 2025 sebesar 28,69 milyar atau rata-rata setiap tahun tumbuh 20,13%. Struktur pajak dalam PAD hanya 17,08% di tahun 2021 dan tahun 2025 Namun jika diperhatikan antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 terdapat peningkatan sebesar 171,97%. Meningkatnya penerimaan pajak akibat adanya optimalisasi dari pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Pada perubahan RKPD tahun 2026 kerangka Pendapatan daerah mengalami beberapa perubahan proyeksi, untuk Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 1.790.000.000,- (0,81%) dari proyeksi awal sebesar Rp. 221.667.211.907,- menjadi Rp. 219.877.211.907,-. Perubahan proyeksi dipengaruhi oleh kenaikan pada pendapatan Retribusi Daerah (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung) sebesar Rp. 10.000.0000,- dan Penurunan pada Lain-lain PAD yang sah (Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lain) sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Untuk Pendapatan Transfer pada tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 279.937.242.000,- dari proyeksi awal sebesar 1.632.898.599.821,- menjadi 1.912.835.841.821,-. Perubahan Proyeksi dipengaruhi adanya penambahan transfer pusat ke daerah yang besumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 202.894.179.000,- dan dari Dana Bagi Hasil kurang Bayar Lebih Bayar sebesar Rp.

75.043.063.000,- serta adanya pendapatan dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 23.093.309.700,- sesuai dengan laporan pada rapat koordinasi antara kepala Bappenda se-NTB, yang sebelumnya Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.32.036.009.000,-, menjadi Rp. 8.942.699.300,-.

Pendapatan daerah diproyeksikan pada Perubahan RPKD tahun 2026 sebagaimana terlihat dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 3 Proyeksi Perubahan Pendapatan RPKD Tahun 2026

Nomor	Uraian	APBD Murni 2026	Perubahan RPKD TA. 2026	Tambah (kurang)
1	2	3	4	5 (4-3)
4	PENDAPATAN DAERAH			
04.01	Pendapatan Asli Daerah	221.667.211.907,00	219.877.211.907,00	-1.790.000.000,00
04.01.01	Pajak Daerah	42.554.335.000,00	42.554.335.000,00	0,00
04.01.02	Retribusi Daerah	155.638.135.907,00	155.648.135.907,00	10.000.000,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.844.055.000,00	7.844.055.000,00	0,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	15.630.686.000,00	13.830.686.000,00	-1.800.000.000,00
04.02	Pendapatan Transfer	1.632.898.599.821,00	1.912.835.841.821,00	279.937.242.000,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.572.408.830.000,00	1.852.346.072.000,00	279.937.242.000,00
04.02.02	Transfer Antar Daerah	60.489.769.821,00	60.489.769.821,00	0,00
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32.036.009.000,00	8.942.699.300,00	-23.093.309.700,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	32.036.009.000,00	8.942.699.300,00	-23.093.309.700,00
		1.886.601.820.728,00	2.141.655.753.028,00	255.053.932.300,00
5	BELANJA DAERAH			
05.01	Belanja Operasi	1.652.748.270.379,00	1.794.185.675.908,00	141.437.405.529,00

Nomor	Uraian	APBD Murni 2026	Perubahan RKPD TA. 2026	Tambah (kurang)
05.01.01	Belanja Pegawai	1.197.143.158.022,00	1.210.590.580.543,00	13.447.422.521,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	442.186.642.357,00	568.322.476.365,00	126.135.834.008,00
05.01.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
05.01.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
05.01.05	Belanja Hibah	13.383.480.000,00	15.237.629.000,00	1.854.149.000,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	34.990.000,00	34.990.000,00	0,00
05.02	Belanja Modal	64.518.791.068,00	115.671.665.393,00	51.152.874.325,00
05.02.01	Belanja Tanah	500.000.000,00	339.830.000,00	-160.170.000,00
05.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	16.305.373.793,00	41.142.879.680,00	24.837.505.887,00
05.02.03	Belanja Bangunan Gedung	17.589.297.775,00	30.379.525.963,00	12.790.228.188,00
05.02.04	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	30.050.119.500,00	43.799.429.750,00	13.749.310.250,00
05.02.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	74.000.000,00	10.000.000,00	-64.000.000,00
05.03	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	5.500.000.000,00	2.000.000.000,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	5.500.000.000,00	2.000.000.000,00
05.04	Belanja Transfer	265.920.570.000,00	293.714.294.200,00	27.793.724.200,00
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	5.860.855.000,00	5.860.855.000,00	0,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	260.059.715.000,00	287.853.439.200,00	27.793.724.200,00
		1.986.687.631.447,00	2.209.071.635.501,00	222.384.004.054,00
	Surplus/ Defisit	-100.085.810.719,00	-67.415.882.473,00	32.669.928.246,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
06.01	Penerimaan Pembiayaan			
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	101.085.810.719,00	68.415.882.473,00	-32.669.928.246,00
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
06.01.06	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	101.085.810.719,00	68.415.882.473,00	-32.669.928.246,00

Nomor	Uraian	APBD Murni 2026	Perubahan RKPD TA. 2026	Tambah (kurang)
06.02	Pengeluaran Pembiayaan			
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0,00	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
06.02.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0,00	0,00
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0,00	0,00
06.02.05	Dana Bergulir	0	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Neto	100.085.810.719,00	67.415.882.473,00	-32.669.928.246,00
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA-TB)	0,00	0,00	0,00

3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 belanja diproyeksikan sebesar Rp 2.209.071.635.501,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 222.384.004.054,- dari APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.986.687.631.447,- dengan rincian:

- Belanja pegawai naik sebesar Rp. 13.447.422.512,- dengan adanya Penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Anggaran sisa DAU Earmark PPPK dan Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran.
- Belanja Barang dan Jasa naik sebesar Rp. 124.519.912.455,-.
- Belanja Hibah naik sebesar Rp. 1.854.149.000,- dari awal sebesar Rp. 13.383.480.000,- menjadi Rp. 15.237.629.000,-.

Belanja Modal diproyeksikan yang mengalami peningkatan dengan nilai Rp 51.152.874.325,- terdiri dari :

- Belanja Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp 24.837.505.887,- dari Rp. 16.305.373.793,- menjadi Rp. 41.142.879.680,- yang diperuntukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Belanja Modal Belanja Bangunan Gedung mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.790.228.188,- dari Rp. 17.589.297.775 menjadi Rp. 30.379.525.963,-.

- c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi kenaikan sebesar Rp 13.749.310.250,- dari Rp. 30.050.119.500,- menjadi Rp. 43.799.429.750,-.
- d) Belanja Modal Aset tetap Lainnya pada Belanja Modal Bahan Perpustakaan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya turun sebesar Rp. 64.000.000,- dari Rp. 74.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,-.

Penggunaan alokasi belanja pada tahun 2026 masih di fokuskan pada Prioritas Pembangunan Daerah, kebijakan ekonomi nasional untuk transformasi ekonomi, yang paling sedikit meliputi : penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah SDA serta pemenuhan kebutuhan rutin yang teranggarkan pada penetapan 2026.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima merencanakan belanja untuk pelaksanaan program-program yang berdampak pada pemulihan perekonomian. Pengalokasian program transformasi ekonomi ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan output perekonomian dan mengembalikan perekonomian pada jalur potensial pra pandemi. Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah, termasuk konektivitas antar wilayah, peningkatan produktivitas SDM, melalui sektor pendidikan, pelatihan dan kesehatan, untuk pelaksanaan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Kabupaten Bima juga tetap mengacu pada belanja untuk merealisasikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan tetap memperhatikan dinamika, potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah. Selain itu, proporsi belanja wajib, mengikat, mandatory dan prioritas lainnya dalam dokumen Perubahan RKPD khususnya urusan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Belanja Pegawai, dan Peningkatan Kapasitas SDM, serta alokasi mandatory DAU Earmark.

Proyeksi Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3. 4 Proyeksi Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Nomor	Uraian	APBD Murni 2026	PERUBAHAN RKPD TA. 2026	Tambah (Kurang)
5	BELANJA DAERAH			
05.01	Belanja Operasi	1.652.748.270.379,00	1.794.185.675.908,00	141.437.405.529,00
05.01.01	Belanja Pegawai	1.197.143.158.022,00	1.210.590.580.543,00	13.447.422.521,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	442.186.642.357,00	568.322.476.365,00	126.135.834.008,00
05.01.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
05.01.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
05.01.05	Belanja Hibah	13.383.480.000,00	15.237.629.000,00	1.854.149.000,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	34.990.000,00	34.990.000,00	0,00
05.02	Belanja Modal	64.518.791.068,00	115.671.665.393,00	51.152.874.325,00
05.02.01	Belanja Tanah	500.000.000,00	339.830.000,00	-160.170.000,00
05.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	16.305.373.793,00	41.142.879.680,00	24.837.505.887,00
05.02.03	Belanja Bangunan Gedung	17.589.297.775,00	30.379.525.963,00	12.790.228.188,00
05.02.04	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	30.050.119.500,00	43.799.429.750,00	13.749.310.250,00
05.02.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	74.000.000,00	10.000.000,00	-64.000.000,00
05.03	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	5.500.000.000,00	2.000.000.000,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	5.500.000.000,00	2.000.000.000,00
05.04	Belanja Transfer	265.920.570.000,00	293.714.294.200,00	27.793.724.200,00
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	5.860.855.000,00	5.860.855.000,00	0,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	260.059.715.000,00	287.853.439.200,00	27.793.724.200,00
		1.986.687.631.447,00	2.209.071.635.501,00	222.384.004.054,00

3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bima pada perubahan tahun 2026 berasal dari pemanfaatan SiLPA hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2025. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2026 dilakukan penyesuaian pada penyertaan modal.

Pembiayaan Netto tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 100.085.810.719,- sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 pembiayaan netto diproyeksikan menurun menjadi Rp 67.415.882.472,70 dipengaruhi oleh realisasi SiLPA pada Tahun 2025.

Adapun rincian SiLPA Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 5.207.916,-
- 2) Kas di BLUD Rp 9.479.198.469,58
- 3) Kas di Dana BOSP Rp 214.489.449,70
- 4) Kas di Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat:
 - Sisa DAU Earmark PPPK Rp 2.174.766.063,-
 - Sisa Dana DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Rp. 948.116.632,-
 - Sisa DAU Earmark Kesehatan Rp. 3.093.300.218,-
 - Sisa DAU Earmark Pendidikan Rp. 5.481.927.056,42
 - Sisa DAU untuk paket pekerjaan luncuran (Dikbudpora) Rp. 1.763.600.000,-
 - Sisa DAK untuk paket pekerjaan luncuran (Dikes) Rp. 3.986.272.018,-
 - Sisa DBHCHT untuk paket pekerjaan luncuran (Dikes) Rp. 299.575.000,-
 - Sisa DAU untuk paket pekerjaan luncuran (PUPR) Rp. 4.119.061.250,-
 - Sisa Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Pendapatan Hibah Pusat/Hibah RR) Rp. 891.207.400,-

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memperhatikan alokasi yang bersifat “terikat” (harus dianggarkan kembali) dan alokasi yang bersifat “bebas” (bisa dialokasikan sesuai prioritas daerah), dalam rangka pemenuhan kebutuhan prioritas daerah pada kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Selanjutnya untuk proyeksi pembiayaan pada perubahan tahun 2026 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3. 5 proyeksi pembiayaan pada perubahan tahun 2026

Nomor	Uraian	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD TA. 2026	Tambah (kurang)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	101.085.810.719,00	68.415.882.472,70	- 32.669.928.246,30
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0		-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0		-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0		-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0		-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0		-
		101.085.810.719,00	68.415.882.472,70	-32.669.928.246,30
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	-
6.2.5	Dana Bergulir	0	0	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Neto	100.085.810.719,00	67.415.882.472,70	-32.669.928.246,30
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA-TB)	0,00	0,00	0,00

BAB III Error! Bookmark not defined.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **1**

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	1
3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....	2
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Nusa Tenggara Barat.....	7
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bima.....	9
3.1.4	Tantangan Dan Strategi.....	12
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	14
3.2.1	Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan.....	16
3.2.2	Kerangka Pendanaan Keuangan.....	17
3.3	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	19
3.4	Arah Kebijakan Belanja Daerah	23
3.5	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	25
Tabel 3. 1	Realisasi dan Target Makro Ekonomi Kabupaten Bima 2023 – 2026	10
Tabel 3. 2	Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2026	17
Tabel 3. 3	Proyeksi Perubahan Pendapatan RPKPD Tahun 2026.....	21
Tabel 3. 4	Proyeksi Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2026	25
Tabel 3. 5	proyeksi pembiayaan pada perubahan tahun 2026	27